

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan *power politics* negara Thailand pada masa kolonialisme 1511 – 1980. Penelitian dilakukan dengan tiga tahap, Pertama peneliti mereduksi data-data yang telah diperoleh dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema ataupun pola yang berkaitan dengan bentuk *power politics* politik negara Thailand dalam pada masa kolonialisme berdasarkan komponen-komponen dari kerangka teori yang telah ditentukan, Seperti keputusan-keputusan yang bersifat politik, hubungan-hubungan Thailand dengan negara pelaku kolonial, dan konflik-konflik yang berakibat penting dalam menjaga keberlangsungan negara Thailand sehingga tidak dijajah.

Kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh, dengan penyajian ini data yang peneliti menyusun data yang telah didapatkan agar lebih terorganisir, dan tersusun dalam pola hubungan dan semakin mudah dipahami berkaitan dengan *power politics* negara Thailand pada masa kolonialisme. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan dari langkah reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan disesuaikan dengan rumusan masalah juga kerangka teori yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu bentuk-bentuk hubungan negara thailand dengan negara lain ataupun penjajah pada masa kolonialisme agar bisa tergambarkan komponen *power politics* seperti apa yang mereka pakai untuk mengatasi konflik maupun bentuk-bentuk hubungan lain yang pernah dilakukan oleh negara Thailand, berikut juga dengan fase-fase hubungan mereka agar gambaran yang

didapat lebih jelas, sehingga bisa ditarik kesimpulan *power politics* seperti apa yang mereka pakai dalam mengatasi konflik dan mendapatkan sebuah hubungan dengan negara pelaku kolonial pada masa tersebut.

Selanjutnya, setelah dijelaskan bentuk-bentuk hubungan negara Thailand dengan negara pelaku kolonial, barulah ditarik kesimpulan bentuk *power politics* seperti apa yang digunakan negara Thailand dalam mengatasi penjajah pada masa Kolonialisme di tuntun oleh kerangka teori yang telah ditentukan berdasarkan kerangka teori *power politics* yang didasari pemikiran Joseph Samuel Nye, Jr. tentang *power* yang terbagi atas *hard power* dan *soft power*.

#### **A. Hubungan Thailand dengan Negara Pelaku Kolonial pada Masa Kolonialisme**

Thailand telah banyak melakukan berbagai macam bentuk kontak dengan negara lain sepanjang sejarah berdirinya negara tersebut, baik itu berupa kontak yang berujung dengan hubungan damai ataupun yang berujung konflik. Untuk mendapatkan gambaran dari *power politics* negara Thailand pada masa tersebut, perlu dipahami bagaimana gambaran hubungan negara Thailand dengan negara pelaku kolonial pada masa kolonialisme.

##### 1. Thailand – Portugal

Berdasarkan dokumen sejarah, Portugal adalah negara eropa pertama yang membuat kontak dengan kerajaan Thailand lama yaitu kerajaan Ayutthaya, tercatat semenjak tahun 1511 (MOS, 2012). Posisi Kerajaan Ayutthaya pada saat itu merupakan sebuah pelabuhan penting baik secara lokal maupun internasional, hal ini menjelaskan bahwa Thailand punya salah satu komponen

*power politics hard power* yaitu wilayah atau geografi (*geography/territory*) dimana menguntungkan mereka dalam memulai hubungan dengan negara lain. Agar mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hubungan kedua negara ini akan dijelaskan beberapa fase tahapan hubungan antara Thailand dan negara Portugis, yaitu :

a. Pertemuan dengan Siam (1511)

Ketika India sudah tidak dianggap lagi sebagai sumber utama rempah-rempah, tujuan utama orang-orang Portugis selanjutnya adalah kerajaan Malakka, yang saat itu sudah dibawah perintah kerajaan Ayutthaya. Pada tahun 1511, untuk memulai hubungan dengan kerajaan Ayutthaya, orang-orang portugis mengirimkan perwakilan ke istana kerajaan dimana raja Ramathibodi II menyambut dengan hangat dan memberikan izin kepada Portugal untuk memulai perdagangan dengan kerajaan Ayutthaya (MOS, 2012).

Barang utama yang dibutuhkan kerajaan Ayutthaya dari Portugal adalah senjata api. Mulai dari tahun 1511 sampai seterusnya, Thailand terus menjalin hubungan dengan negara Portugal yang kemudian memaikan peran penting diberbagai aspek, baik politik, militer, komersial, ataupun budaya. Untuk bukti pengakuan hubungan, orang-orang Portugal diberi tanah untuk bermukim (Cunha, 1971).

b. Kemerosotan Portugal di Thailand

Pada tahun 1640 dan seterusnya Portugal mengalami kemerosotan, hal ini disebabkan oleh Portugal yang kalah saing dengan perusahaan dagang

Belanda dan Britania (Kerajaan Inggris) yang tergolong baru saat itu. Perusahaan-perusahaan itu dengan berfokus untuk memonopoli semua barang sebanyak yang mereka bisa.

Setelah keruntuhan kerajaan Ayuthhaya yang disebabkan kerajaan Burmese pada tahun 1767, desa orang-orang Portugis diserbu, para pendatang baru dibunuh, dan sebagian melarikan diri ke tempat lain. Hal tersebut hanya meninggalkan reruntuhan dan jejak budaya mereka.

#### c. Kebangkitan Hubungan dengan Thailand

Pada Tahun 1785, saat era dinasti Chiakri meletuslah *nine-army war* (perang besar antara Siam dan Burmese), istana kerajaan Siam (King Rama I) menerima bantuan dari negara Portugal dalam bentuk persenjataan dan dideskripsikan dalam bentuk surat dari ratu Portugal untuk mengirimkan senjata api untuk membantu upaya perang melawan Burmese. Selanjutnya, untuk membalas kebaikan ratu Portugal, Siam menawarkan tanah untuk membangun pabrik perdagangan (MOS, 2012).

Dari deskripsi hubungan Thailand – Portugal diatas, menjelaskan bahwa negara Thailand memang telah terbuka dengan negara barat ditahun yang terhitung satu abad setelah bangsa eropa mulai mengibarkan benderanya diberbagai belahan dunia. Disamping itu juga, hal ini membuktikan bahwa kemampuan diplomasi sebagai bagian dari komponen *soft power*, negara Thailand juga mampu membuat mereka mendapatkan kerja sama dengan Portugis, dimana diplomasi tersebut diwujudkan dengan kerja sama dan negosiasi dengan pertukaran senjata dan sumber daya alam.

## 2. Thailand – Burmese (Myanmar)

Dalam Pada akhir abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16, tidak hanya kekuatan dari negara barat saja yang mencoba menjajah kerajaan Siam, tetapi juga ada ancaman dari kekuatan negara tetangga yang menghantui mereka, salah satu yang paling berpengaruh adalah kerajaan Burmese (Myanmar). Ada dua kejadian kunci yang mempengaruhi hubungan kedua kerajaan ini, yaitu :

### a. Peperangan Siam- Burmese Bagian Pertama (1569)

Pada tahun 1558, Burmese menjadikan kerajaan Lan Na sebagai bawahannya. Lan Na sendiri merupakan salah satu kerajaan yang masih terhubung dengan kerajaan Ayutthaya sebagai sesame *Siamese*. Mulai dari tahun tersebut, Burmese dibawah perintah raja Bayinnaung (1551-1581) menyerang dan mengambil wilayah kerajaan Ayutthaya bagian utara kota, dan mendapatkan semua wilayahnya pada tahun 1569.

Setelah kejatuhan, Ayutthaya yang telah dijarah, semua anggota kerajaan maupun orang biasa ditangkap dan dibawa ke Burmese sebagai tahanan. Dunia orang-orang *Tai* pada saat itu sedang dalam kekacauan serius, beberapa kelompok orang-orang *Tai* faktanya telah berkhianat dan bergabung dengan Burmese melawan Ayutthaya dimana semakin memperparah keadaan (Ellen, 2011).

### b. Pergerakan Balik Layar Raja Naruseun (Kebangkitan Ayutthaya)

Setelah beberapa dekade mengalami aib diduduki kerajaan Burmese, kebangkitan raja Naresuan (1590-1605) berhasil mengembalikan kerajaan

Ayutthaya menjadi independen. Raja Naraseun adalah penggerak dibalik layar dibelakang terjadinya perubahan sosial dan politik di Ayutthaya.

Pada tahun 1584, raja Naraseun mendeklarasikan Ayutthaya tidak lagi menjadi bawahan Burmese dan berhasil menghindari serangan Burmese juga Kamboja untuk mempertahankan status independent Ayutthaya (Ellen, 2011).

c. Peperangan Siam- Burmese Bagian Kedua (1767)

Pada akhir abad ke-18, konflik dengan kerajaan Burmese masih terus berlanjut, akan tetapi raja Borommaracha (1768-1767) tidak berbuat banyak untuk membentengi kerajaan melawan Burmese. Pada tahun 1767, Burmese menyerang Ayutthaya dan menjarahnya sekali lagi, membuat sang raja dan ribuan orang-orang Siam menjadi tahanan. Kerajaan Burmese juga menghancurkan kota, kerajinan tangan dan jejak historial. Kerajaan Ayutthaya pun runtuh, ditahun itu juga dibawah pemerintahan Taksin (gubernur salah satu provinsi siam yaitu provinsi Tak), Siam merebut kembali semua wilayah Ayutthaya yang ditaklukkan dari Burma, Siam pun kembali lolos dari genggamannya kerajaan burmese meskipun dibayar mahal.

Konflik antar kerajaan yang berdekatan dengan Ayutthaya memang telah banyak terjadi bahkan sebelum eropa mendatangi asia tenggara. Peperangan tersebut menunjukkan bahwa Thailand juga punya komponen *hard power* lain, yaitu kekuatan militer (*military*) yang dibarengi dengan, dimana meskipun telah banyak peperangan kerajaan yang dilalui oleh negara Thailand tetapi tetap saja bisa bangkit dari keterputukan.

### 3. Thailand – Inggris

Pada tahun 1608 salah satu kapten kerajaan Inggris William Keeling bertemu duta dari raja Ekathotsarot (raja Ayutthaya tahun 1605-1610) di kota *Bantam* (Banten). Selama abad ke-17 *The English East India Company* (Perusahaan Hindia Timur Britania/Inggris) pertama kali tiba dan mendirikan pabrik di kerajaan Ayutthaya.

Pada 1612, para pedagang Inggris mengirimkan surat dari Raja James I kepada Raja Ekathotsarot sehubungan dengan perdagangan dan menjalin hubungan (Peter, 2014). Terdapat beberapa kejadian kunci hubungan Thailand dan Inggris selama masa kolonialisme yaitu :

#### a. *Anglo-Siamese War* (1687-1688)

*Anglo-Siamese War* adalah konflik yang melibatkan kerajaan Siam (Ayutthaya) dan kerajaan Inggris. Perang ini sebagian besar disebabkan oleh perebutan pengaruh antara kerajaan Inggris dan Prancis. Akhir dari perang ini adalah diturunkannya Gubernur kepulauan *Mergui*, yang sebelumnya dipimpin Inggris akhirnya digantikan Prancis sekaligus melemahnya pengaruh Inggris disana (J. Horton, 2007).

#### b. Masalah Perbatasan Inggris dan Myanmar-Siam (1824-1846)

Setelah penaklukan Inggris atas Burma pada tahun 1824, Inggris merundingkan sebuah perjanjian dengan Siam yang mencakup perihal umum perdagangan dan menjalin hubungan persahabatan.

Pada tahun 1825, *The English East India Company* (Perusahaan Hindia Timur Britania/Inggris) mengirim utusannya, Henry Burney (1825-26), ke istana Siam di Bangkok untuk merundingkan urusan negara dan perjanjian

perdagangan di antara mereka. Selama Burney tinggal di Siam, Inggris menaklukkan Burma Selatan.

Burma Selatan dengan demikian menjadi provinsi milik Inggris, sebagai akibatnya, membuat perbatasan barat Inggris dengan Siam dipertanyakan. Burney meminta Pengadilan Siam untuk menunjuk seorang pejabat tinggi untuk merundingkan batas-batas antara wilayah yang baru diperoleh Inggris dan Siam (Richard, 2017).

c. *Bowring Treaty* (1855)

Selama 1834-36, administrasi kolonial Inggris di India mengirim misi ke Chiangmai (bagian utara Thailand saat ini). Misi tersebut ditugaskan untuk negosiasi perbatasan antara Provinsi Tennasserim di Burma Inggris dan Kerajaan Siam. Hal ini mengakibatkan terjadinya Perjanjian Bowring tahun 1855 antara Inggris dan Siam dan jatuhnya sebagian wilayah Siam ketangan Inggris.

*Bowring Treaty* mempengaruhi kepentingan negara Siam mengenai penyediaan hak milik formal atas tanah dengan membatasi, *Pertama*, kemampuan negara untuk mengenakan pajak atas tanah, *Kedua*, hak negara untuk memutuskan siapa yang dapat memiliki dimana tanah berada, dan *Ketiga*, undang-undang mengenai tanah (yurisdiksi) pemerintah Siam atas rakyat Inggris di Siam (ekstrateritorialitas) (Richard, 2017).

Hubungannya banyak diwarnai oleh perebutan pengaruh di dalam pemerintahan dan dilanjutkan perebutan wilayah antara keduanya. Perebutan wilayah tersebut disebabkan oleh tanah jajahan negara Inggris berdekatan

dengan negara Thailand yang mempunyai kepentingannya sendiri. Diplomasi sebagai *soft power* juga berhasil dengan negara Inggris diperlihatkan oleh tidak hanya diwujudkan dengan hubungan dagang dan perjanjian-perjanjian saja tetapi juga banyak orang Inggris menjadi orang pemerintahan pada masa hubungan kedua negara tersebut. Penggunaan kekuatan militer (*hard power*) juga terjadi diakibatkan negara Inggris yang ingin mendapatkan wilayah lebih di Asia Tenggara pada masa tersebut.

#### 4. Thailand – Perancis

Hubungan Thailand (Siam) dan Perancis hampir sama seperti pola hubungannya dengan negara Inggris, dimana diawali dengan kerja sama dagang, dan diwarnai dengan perebutan pengaruh dibidang pemerintahan juga diiringi dengan perebutan lahan jajahan disekitar negara Thailand. Hubungan kedua negara tersebut sebenarnya sudah cukup lama, hampir bersamaan dengan permulaan hubungan Inggris dan Siam pada abad ke-15 saat kerajaan Ayutthaya masih berdiri. (Richard, 2017). Bermula dari niat penyebaran agama Kristen yang gagal, sampai kehubungan dagang. Perancis dan banyak negara lain terutama Inggris, saling berebut pengaruh di Siam. Terdapat beberapa peristiwa kunci dari hubungan kedua negara ini, yaitu :

##### a. *Franco-Siamese War* (1893-1914)

Pada tahun 1892, konflik dimulai ketika Gubernur Jenderal Indocina Perancis Jean de Lanessan mengirim Auguste Pavie sebagai konsul ke Bangkok untuk membawa Laos yang saat itu dibawah kekuasaan Thailand agar diserahkan di bawah kekuasaan Perancis. Pemerintah di Bangkok,

secara keliru percaya bahwa mereka akan didukung oleh pemerintah Inggris, merekapun menolak untuk menyerahkan wilayah timur Mekong dan malah memperkuat militer mereka (Amable, 2011).

Penolakan tersebut mendapat balasan dari Prancis pada tahun 1893 dengan mengirim tentara ke wilayah yang disengketakan oleh kedua negara tersebut. Karena tidak dibantu oleh Inggris, mengakibatkan akhir dari konflik tersebut adalah diserahkannya wilayah Laos yang dikuasai Siam ke tangan Prancis (Amable, 2011).

b. *Franco-Thai War* (1940-1941)

Setelah Kejatuhan Prancis pada tahun 1940 atas serangan Jerman pada awal Perang Dunia II, membuat negosiasi Thailand dengan Prancis sesaat sebelum Perang Dunia II telah menunjukkan bahwa pemerintah Prancis bersedia membuat perubahan dalam batas-batas antara Thailand dan Indocina Prancis (daerah jajahan Prancis di Asia Tenggara).

Mayor Jenderal Plaek Pibulsonggram (Phibun), perdana menteri Thailand, memutuskan bahwa kekalahan Prancis memberi Thailand kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan kembali wilayah negara jajahan yang diserahkan ke Prancis selama pemerintahan Raja Chulalongkorn.

Setelah invasi Jepang ke Indochina Prancis pada bulan September 1940, Prancis terpaksa mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer. Keputusan Prancis ini membuat rezim Phibun percaya bahwa Prancis tidak akan secara serius menolak konfrontasi militer dengan Thailand.

Jepang kemudian turun tangan untuk menengahi konflik tersebut. Prancis dipaksa dan terpaksa untuk gencatan senjata dan juga dipaksa oleh Jepang untuk melepaskan cengkeraman mereka di perbatasan yang disengketakan (Eiji, 2015).

Penjelasan tersebut mengidentifikasi bahwa komponen *hard* dan *soft power* punya peranan masing-masing dalam hubungan kedua negara tersebut, seperti dalam hal *soft power* berhasil membuat Thailand membuat mereka menjalin hubungan diplomasi yang diwujudkan dengan kerjasama dagang, sedangkan dalam hal *hard power* mereka menggunakan kekuatan militer (*military*) dalam hal mencoba mempertahankan daerah-daerah yang ingin direbut oleh Perancis.

#### 5. Thailand – Amerika

Pada tahun 1821 kapal kapal laut negara Amerika pertama kali sampai di kota Bangkok, menandai kontak pertama mereka. Kemudian, disusul pada tahun 1931 misionaris pertama negara Amerika tiba di Thailand (Robert, 1990). Teridentifikasi bahwa negara Thailand banyak menggunakan komponen *soft power* dalam mengatasi hubungannya dengan Amerika, Berikut dijelaskan beberapa peristiwa kunci dalam hubungan kedua negara ini, yaitu :

##### a. *Treaty of Amity and Commerce* (1833)

*Treaty of Amity and Commerce* (Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan) Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1833 dan, setelah di setujui oleh kedua belah pihak, mulai berlaku pada tanggal 14 April 1836. Perjanjian tersebut tidak lagi berlaku, setelah

digantikan mulai tahun 1921 oleh serangkaian perjanjian berikutnya, tetapi perjanjian pengganti ditandatangani pada tahun 1966 tetap berlaku. Hal ini menyebabkan jalinan hubungan dan perdagangan yang damai dan bersahabat antara kedua negara yang umumnya bertahan sejak saat itu.

b. Pernyataan Perang Terhadap Amerika

Setelah Perang Dunia II pecah di Eropa (1939–1945), Negara Jepang menggunakan pengaruhnya yang telah diperolehnya di Prancis untuk mendapatkan pemberian hak territorial Thailand di Laos dan Kamboja kepada Jepang, dimana sebelumnya salah satu daerah jajahan tersebut merupakan hasil yang didapatkan dari perebutan wilayah antara Prancis dan Thailand sebelumnya, maka dari itulah hal tersebut mempermudah jalan Jepang untuk memasuki Asia Tenggara.

Pernyataan perang dengan Amerika disebabkan ketika Thailand dan Jepang pada tanggal 8 Desember 1941 akan melakukan perang, ketika pasukan Thailand dan Jepang akan bertukar di Tanah Genting Kra, tetapi malah di Bangkok ketika dipimpin oleh Phibun yang saat itu berkuasa menyetujui tuntutan Jepang agar pasukannya diizinkan melintasi tanah genting Kra untuk menyerang Burma dan Malaya (*Library Of Congress*, 2007).

Pada Januari 1942, Phibun menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Jepang dan menyebabkan mereka berbalik menyatakan perang melawan Inggris dan Amerika Serikat. Akan tetapi Seni Pramoj, duta besar Thailand anti-Jepang untuk Washington, menolak perintah pemerintahnya

untuk menyampaikan deklarasi perang, dan Amerika Serikat menahan diri untuk tidak menyatakan perang terhadap Thailand.

c. *Treaty of Amity and Commerce* (1966)

Setelah Jepang dijatuhi bom atom dan menyerah pada tahun 1942, Amerika Serikat menahan diri untuk tidak berurusan dengan Thailand sebagai musuh dalam negosiasi damai pascaperang. Pada tahun 1966, akhirnya Thailand dan Amerika kembali membuat perjanjian yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 29 Mei 1966.

Perjanjian tersebut memungkinkan warga negara Amerika dan bisnis yang didirikan di AS, atau di Thailand untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas atau memiliki perusahaan sepenuhnya di Thailand, dan dengan demikian terlibat dalam bisnis dengan dasar yang sama seperti warga negara Thailand (*Library Of Congress*, 2007).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam mengatsi hubungan Thailand dengan Amerika mereka lebih mengutamakan komponen *soft power* yaitu diplomasi yang diwujudkan dengan kerja sama, negosiasi dan perjanjian-perjanjian, sebagaimana sebelum Perang dunia II tercatat tidak terlalu dekat, hanya sekedar diplomasi dengan bentuk kerjasama dagang dan bantuan militer saja, baru ketika Perang Dunia II selesai Amerika mendapat tempat untuk bekerja sama lebih dekat meskipun sebelumnya negara Thailand sempat menjadi musuh dan menyatakan perang (akan tetapi tidak sampai perang) Amerika karena diktator Long Phibun yang memihak negara Jepang, akan tetapi

berhasil digagalkan karena terdapat beberapa kolompok di Thailand yang tidak menyukai Jepang.

#### 6. Thailand – Jepang

Pada tahun 1593, ketika Raja Naresuan mengalahkan Phra Maha Uparaja, Putra Mahkota Burma, pertempuran Gaja (*Elephant War*), pasukannya terdiri dari 500 tentara Jepang (MFA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang telah memasuki Asia Tenggara khususnya Thailand beberapa waktu yang lama sebelumnya. Hubungan kedua negara ini lebih diakibatkan karena kepentingan Jepang yang ingin mempermudah negara Asia Tenggara lainnya, hal tersebut didukung juga oleh kesamaan paham pemimpin Thailand kala itu yaitu Long Phibun sehingga keduanya bisa menjalin hubungan diplomasi sebagai bentuk *soft power* dari *power politics* yang menguntungkan negara Jepang. Berikut adalah peristiwa kunci antara kedua negara ini, yaitu :

##### a. Pertemuan Awal

Seperti dengan negara lainnya Thailand selalu terbuka untuk membuka pintu perdagangan dengan negara atau kerajaan lain, kontak dimulai dengan perdagangan Jepang di *Red Seal Ships* (Kapal dagang Jepang di lautan Asia Tenggara 1600-1635) dan diadakannya komunitas Jepang di tanah Siam, yang akhirnya terputus saat periode pengasingan Jepang (1687). Kontak dilanjutkan pada abad ke-19 dan berkembang ke titik di mana Jepang saat ini menjadi salah satu mitra ekonomi terkemuka Thailand (MFA, 2021).

##### b. Thailand dan Jepang saat Perang Dunia II

Seperti telah disebutkan pada pembahasan hubungan Thailand – Amerika sebelumnya, pada saat Jepang mulai menginjakkan kakinya di Asia Tenggara dan masuk ke Thailand yang dipimpin oleh Phibun, mereka adalah anggota Blok Sekutu dan berubah menjadi anggota Blok Poros ketika akhirnya menjalin “fakta pertahanan bersama” pada tahun 1942, lalu ikut menyatakan perang melawan anggota Blok Sekutu.

Menyerahnya Jepang dan berakhirnya Perang Dunia II membuat situasi diplomatik Thailand semakin sulit. Meski Phibun (penyusun persekutuan dengan Jepang) tidak lagi berkuasa, fakta bahwa Thailand telah menyatakan perang dengan Blok Sekutu dan mengklaim teritori dari genggaman Malaya, Burma, Inggris serta Prancis tidak dapat dilupakan begitu saja.

Sebaliknya, Amerika Serikat yang sebelumnya tidak pernah punya kedudukan kuat di Thailand sebelum perang, saat itu muncul sebagai teman baru yang terbaik dibandingkan anggota Blok Sekutu lainnya. Pergeseran menjadi bersekutu dengan Amerika Serikat menjadi faktor signifikan dalam perkembangan politik dan ekonomi Thailand selama beberapa decade berikutnya (Ricklefs, et al, 2013).

Penjelasan mengenai hubungan negara Thailand diatas sedikit banyak telah menggambarkan tentang bagaimana mereka mempraktekan *power politics* yaitu *hard power* dan *soft power*, tetapi hal tersebut masih dirasa kurang untuk menjelaskan bagaimana mereka bereaksi terhadap ancaman yang datang diwaktu bersamaan dimana banyak pelaku kolonial yang membuat wilayah jajahan disekitar mereka kala itu yang ikut mengancam kemerdekaan Thailand .

Untuk menghindari ancaman dari penjajahan barat. Thailand telah diidentifikasi menggunakan komponen dari *soft power* yaitu diplomasi dengan membentuk kerjasama dengan negara-negara eropa, hal ini dimulai dengan menandatangani sejumlah perjanjian dengan negara-negara Eropa, dimulai dengan perjanjian dengan Inggris pada tahun 1855. Sejak itu, Thailand berusaha untuk membina hubungan persahabatan dengan semua negara, mengirim Phya Montri Surawong (Chum) sebagai utusan khusus ke Inggris pada tahun 1857 dan Phya Sripipat (Pae Bunnag) ke negara yang sama pada tahun 1861 (MFA, 2021).

*Soft power* diplomasi terlihat juga dari bagaimana salah satu raja mereka yaitu raja Chulalongkorn pada tahun 1968 berusia 15 tahun, Raja Chulalongkorn, dia tercatat sebagai salah satu tokoh penting di negara Thailand. Raja Chulalongkorn dikenal karena dukungannya yang kuat untuk pendidikan dan sangat menerima serta intergrasi dari pengaruh Barat. Keterampilan diplomatik dan pengetahuan politiknya membantu mempertahankan kemerdekaan Thailand dalam menghadapi ancaman penjajahan Eropa. Raja Chulalongkorn memerintah selama 42 tahun. Di antara banyak prestasinya adalah pendirian pemerintahan gaya Barat yang membuka jalan bagi demokrasi; pendirian rumah sakit dan sekolah kedokteran pertama di negara itu berdasarkan pengobatan Barat; dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Raja Chulalongkorn tetap menjadi salah satu raja yang paling dicintai di Thailand (Ellen, 2011).

Selain itu diplomasi lainnya dilakukan oleh HRH Pangeran Prisdang Chumsai diangkat menjadi Menteri Thailand untuk Inggris Raya pada tahun 1882. Phya Sripipat juga ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Prancis pada tahun 1861. Pada

tahun 1882, H.R.H. Pangeran Prisdang diangkat sebagai Menteri Thailand untuk Prancis serta Italia, Jerman, Belanda, Belgia, Austria-Hongaria, Denmark, Swedia, Norwegia, Spanyol, dan Portugal. H.R.H. Pangeran Naresvoraridhi menjadi Menteri Thailand pertama di Amerika Serikat pada tahun 1885. Phya Suriyanuwat (Kerd Bunnag) diangkat menjadi Menteri Thailand untuk Rusia pada tahun 1897 dan Phya Riddhirongronnachet (Sukh Chuto) dikirim sebagai Menteri ke Jepang pada tahun 1899.

Pada tahun 1885, Thailand menjadi pihak dalam Konvensi Persatuan Pos (*Postal Union Convention*), yang mungkin dianggap sebagai tanda masuk resminya ke dalam keluarga bangsa-bangsa. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa karena Konvensi Persatuan Pos lebih bersifat teknis daripada dokumen politik, Thailand tidak benar-benar bergabung dengan keluarga negara sampai tahun 1899 ketika dia menandatangani Konvensi Den Haag tentang Hukum Perang.

Antara tahun 1886 sampai 1896, Thailand harus menghadapi sejumlah ancaman akibat persaingan koloni antara Inggris dan Prancis. Hal ini diakibatkan oleh perebutan oleh kedua negara tersebut atas silayah yang dimiliki oleh negara Thailand, tindakan tersebut merupakan ancaman bagi kemerdekaan negara. Perebutan wilayah tersebut itu menyebabkan hubungan antara Prancis dan Inggris semakin tegang tetapi Prancis masih menolak untuk mundur. Akibatnya, Thailand terpaksa menandatangani perjanjian dengan Prancis pada 3 Oktober 1893 yang berisi poin-poin utama sebagai berikut (MFA, 2021):

1. Pemerintah Thailand mencabut klaimnya atas wilayah di tepi kiri Sungai Mekong serta pulau-pulau di sungai itu.

2. Pemerintah Thailand tidak akan membangun benteng atau bangunan militer dalam radius 25 mil dari tepi kanan Sungai Mekong.
3. Pemerintah Prancis berhak mendirikan konsulat di mana pun dianggap tepat, seperti di Nakhon Ratchasima dan Nan.

Akan tetapi, meskipun Thailand mematuhi semua persyaratan perjanjian, Prancis dan Inggris masih terus bersaing satu sama lain memperebutkan wilayah lainnya. Pada tahun 1896, dalam *The Anglo-French Declaration* Prancis dan Inggris mencapai kesepakatan mengenai daerah ekspansi kolonial mereka (Namatra, 1970), kesepakatan tersebut juga menyimpulkan tentang Thailand, yang berisi poin-poin utama sebagai berikut:

1. Pemerintah Prancis dan Inggris bersumpah untuk tidak mengirim pasukan ke wilayah antara Sungai Mekong dan Pegunungan Tenasserim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain. Selain itu, warga negara dari salah satu pihak yang tinggal di wilayah tersebut tidak akan menerima hak istimewa atau manfaat khusus yang tidak diterima oleh warga negara dari pihak lain.
2. Perjanjian tersebut tidak boleh menghalangi tindakan apapun yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan yang dianggap penting untuk mempertahankan kemerdekaan Thailand. Juga dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan negara ketiga dalam hal-hal yang dilarang oleh deklarasi ini.

Kesepakatan ini menjadikan Thailand sebagai *buffer state* untuk kedua negara tersebut. Patut dicatat bahwa Thailand tidak ikut berperan dalam menyimpulkan

keepakatan ini. Selain itu, ketentuan perjanjian hanya menyatakan bahwa Prancis dan Inggris tidak akan melanggar kedaulatan Thailand tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, yang berarti bahwa mereka berdua dapat sepakat untuk melanggar hak kedaulatan Thailand. Deklarasi ini, oleh karena itu, tidak menawarkan jaminan kemerdekaan terhadap diri Thailand tetapi hanya menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris tidak akan berperang memperebutkan Thailand (MFA, 2021).

Maka dari itulah banyak juga peneliti mengatakan kondisi negara Thailand yang dikelilingi oleh banyak negara kolonial kala itu menyebabkan mereka menjadi negara *buffer state* atau *buffer zone*, yaitu negara penyangga atau negara tengah. Menurut *Cambride Dictionary*, *buffer state* berarti negara yang damai antara dua negara yang lebih besar, yang mengurangi kemungkinan perang di antara mereka atau *buffer zone* yang artinya area yang dimaksudkan untuk memisahkan dua pasukan yang sedang bertarung (*Cambridge Dictionary*, 2021).

Kondisi *buffer state* ini dikarenakan pada saat masa kolonialisme lokasi mereka dikelilingi oleh banyak negara kolonial lain, seperti perbatasan barat dan selatan Thailand Mengatasi koloni Inggris, perbatasan timur Mengatasi koloni Prancis. Thailand bermain sebagai *buffer state*, artinya menyerap masalah yang dibuat oleh negara koloni disekelilingnya, tetapi tidak jatuh ke salah satu dari mereka, hal inilah yang bertahan dan menyebabkan Thailand tetap bebas tanpa dijajah sampai masa kolonialisme berakhir.

## **B. *Power politics* Negara Thailand dalam Mengatasi Penjajah pada Masa Kolonial**

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan Thailand dengan negara pelaku kolonial pada masa kolonialisme dan juga dari bagaimana mereka bereaksi terhadap penjajah diwilayah sekitar negaranya maka akan dijabarkan *power politics* seperti apa yang digunakan oleh negara Thailand pada masa tersebut, penjelasan tersebut akan didasari oleh pemikiran Joseph Samuel Nye, Jr. tentang *power*.

Menurut Nye *power* adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain demi untuk mencapai hasil yang diinginkan, pengertian tersebut sejalan dengan konsep dari *power politics* yaitu teknik, taktik atau muslihat yang digunakan untuk mencapai cita-cita politik yang diinginkan, selanjutnya menurut Nye Power terbagi menjadi dua, yaitu *hard power* dan *soft power*.

Berikut penjelasan *power politics* negara Thailand dalam mengatasi penjajah pada masa kolonialisme berdasarkan kerangka teori dan data yang telah diperoleh selama penelitian:

### **1. *Hard Power***

Menurutnya Nye *hard power* adalah kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang melalui tindakan paksaan atau ancaman, yang terdiri atas komponen populasi (*population*), wilayah atau geografi (*geography/territory*), sumber daya alam, kekuatan militer (*military*), dan kekuatan ekonomi (*economic strength*). Sedangkan *soft power* lebih keterbalikan dari *hard power* yang menggunakan cara paksa dan ancaman.

Berdasarkan data yang ada maka teridentifikasi bahwa *power politics hard power* yang digunakan negara Thailand adalah kekuatan militer (*military*) dimana banyak kasus menunjukkan bahwa Thailand akan menggunakan *power* ini apabila negara lain telah melakukan ancaman militer terlebih dahulu atau apabila memang jalan damai tidak bisa lagi diperoleh.

Penggunaan bentuk *hard power* kekuatan militer (*military*) ini bisa dilihat dari bisa dilihat dari konflik antara salah satu kerajaan Thailand di masa lampau yakni, Kerajaan Ayutthaya – Burma, konflik berkepanjangan pada abad ke-16 sampai ke-18, Thailand – Inggris, Anglo-Siamese War (1687-1688) dan Masalah Perbatasan Inggris dan Myanmar dengan Siam (1824-1846), Thailand – Prancis, Franco-Siamese War (1893-1914) dan Franco-Thai War (1940-1941).

a. Ayutthaya – Burmese (Myanmar)

Konflik kedua kerajaan ini sudah berlangsung sangat lama. meskipun banyak terjadi pertempuran militer, tetapi ada dua pertempuran militer yang menjadi kunci berubahnya negara Kerajaan Ayutthaya. *Pertama*, pertempuran pada kejatuhan kerajaan Ayutthaya yang pertama pada tahun 1569 karena tidak hanya digempur oleh kerajaan Burmese saja tetapi juga oleh kerajaan Lan Na yang menjadai bawahannya. *Kedua*, pertempuran pada kejatuhan kerajaan Ayutthaya yang kedua pada tahun 1767 dikarenakan raja yang berkuasa tidak berbuat banyak untuk berusaha membentengi kerajaan Ayutthaya dari serangan kerajaan Burmese.

b. Thailand – Inggris

Pertempuran militer antara negara Thailand dan Inggris terjadi setidaknya sebanyak dua kali. *Pertama*, pada kejadian *Anglo-Siamese War* tahun 1687-1688, yang diakibatkan oleh perebutan pengaruh Inggris dan Prancis dan berakhir dengan melemahnya pengaruh Inggris saat itu. *Kedua*, pada konflik perbatasan tahun 1824 sampai 1846 diakibatkan oleh perebutan kekuasaan yang berakhir dengan perjanjian *Bowring Treaty* dan diambilnya sebagian tanah Thailand ke tangan Inggris.

c. Thailand – Prancis

Konflik militer antara Thailand dan Prancis yang terjadi adalah sebanyak dua kali. *Pertama*, *Franco-Siamese War* yang terjadi pada tahun 1893-1914, disebabkan oleh penolakan Thailand terhadap permintaan Prancis terhadap tanah mereka. *Kedua*, *Franco-Thai War* yang terjadi pada tahun 1940-1941, yang disebabkan oleh kesempatan merebut kembali tanah yang sebelumnya diambil, yang terjadi saat awal Perang Dunia II ketika Prancis melemah akibat serangan Jerman.

Salah satu komponen lain yang mendukung *hard power* negara Thailand adalah lokasi mereka yang strategis dimana posisinya dimana pada masa kolonialisme dianggap merupakan sebuah pelabuhan penting baik secara lokal maupun internasional, hal ini menjelaskan bahwa Thailand punya salah satu komponen *power politics hard power* yaitu wilayah atau geografi (*geography/territory*) dimana menguntungkan mereka dalam memulai hubungan dengan negara lain, seperti dilihat dari bagaimana Portugal pertama

kali membuka hubungannya dan selanjutnya mereka menjadi sebagai negara yang banyak dikunjungi negara kolonial.

## 2. *Soft Power*

Menurut Nye komponen dari *soft power* lebih kompleks untuk ditentukan dan berbanding terbalik dengan *hard power* yang menggunakan kekuatan ancaman dan paksaan, suatu negara utamanya akan bertumpu pada tiga komponen daya: budaya (*culture*), nilai politik (*political values*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*).

Peneliti akan menggunakan komponen *soft power* McClory yang berdasarkan komponen dari *soft power* milik Nye, McClory memperluas pilihan komponen dari *soft power* dan mengelompokkannya menjadi 5 kategori, Pemerintah (*government*), Budaya (*culture*), diplomasi (*diplomacy*), pendidikan (*education*), dan bisnis sekaligus inovasi (*Business / Innovation*). Dari komponen tersebut dan berdasarkan data yang ada, maka teridentifikasi bahwa salah satu *power politics* yang digunakan negara Thailand adalah diplomasi dimana diplomasi merupakan bagian dari komponen *soft power*, diplomasi disini diwujudkan dalam bentuk negosiasi dan kerja sama, yaitu kerja sama dagang, militer, pemerintahan, dan perjanjian-perjanjian

Hal ini disebabkan kebanyakan raja-raja Thailand dimasa lalu memang terbuka dengan kehadiran negara asing, meskipun terdapat beberapa raja yang menutup diri dengan kedatangan negara lain pada masa itu tetapi pada kasusnya tidak banyak mengubah status independen mereka.

### a. Portugal

Hubungan diplomasi Portugal sudah berlangsung sangat lama sampai 500 tahun hingga saat ini. Hasil dari hubungan dengan negara Thailand adalah terciptanya hubungan dagang yang menguntungkan juga berlangsung cukup lama, banyak dari orang Portugal mendapat posisi di lapisan pemerintahan kerajaan, hingga kekuatan militer yang disokong oleh orang-orang Portugal dalam berhadapan dengan kerajaan lain.

b. Inggris

Permulaan hubungan kerajaan Thailand dengan Inggris juga diawali dengan kesepakatan dagang antara kedua kerajaan tersebut kala itu. Berbeda dengan Portugal yang hampir tidak ada konflik, Hubungan dengan negara Inggris pernah terjadi gesekan. Gesekan itu berupa perang antara Thailand Inggris pada tahun 1687-1688, perebutan perbatasan yang berakhir dengan diambilnya sebagian wilayah Thailand ke tangan Inggris, terciptanya kesepakatan *Bowring Treaty* (1824-1855), dan pada saat Perang dunia ke-2 dimana Thailand mendeklarasikan perang terhadap Blok Sekutu yang beranggotakan negara Inggris.

c. Prancis

Sama dengan kedua negara sebelumnya, negara Prancis juga dimulai dengan ikatan dagang, dan masuknya orang Prancis di lapisan pemerintahan negara Thailand. Tapi, hubungan keduanya juga tidak terlalu mulus dimana sempat terjadinya gesekan perebutan kekuasaan dalam *Franco – Siamese War* tahun 1893-1914 yang berakhir dengan diambilnya sebagian tanah negara Thailand, dan konflik kedua *Franco – Thai War* tahun 1940-

1941 dimana Thailand bertujuan merebut kembali tanah yang diambil dalam perang sebelumnya.

d. Amerika

Awalnya juga terikat dengan hubungan dagang yang dimulai dengan *Treaty of Amity and Commerce* tahun 1666. Tetapi, terjadi gesekan pada awal Perang Dunia II akibat masuknya kolonial Jepang ke Asia Tenggara. Namun, diakhir Perang Dunia II kedua negara kembali menjalin hubungan dagang dan persahabatan.

e. Jepang

Hubungan negosiasi Jepang – Thailand juga diawali dengan hubungan dagang yang tidak begitu lama seperti negara lainnya, Jepang sempat diasingkan dari Thailand selama beberapa periode (abad ke-17 sampai ke-19). Puncak hubungan mereka pada masa kolonialisme adalah ketika Jepang mulai menargetkan Asia Tenggara, dimana akhirnya pemimpin Thailand kala itu setuju untuk berkerja sama dengan Jepang sehingga membuatnya bergabung dipihak Jepang, meskipun akhirnya ketika Jepang kalah Thailand tetap mengamankan hubungannya dengan blok sekutu.

Diplomasi ini juga terlihat dari bagaimana mereka menangani hubungan dengan negara-negara eropa terutama yang punya wilayah berdekatan dengan mereka yaitu Inggris dan Perancis, dimana negara Thailand mulai membuat perjanjian-perjanjian dengan negara tersebut, sehingga menjadikan mereka sebagai *buffer state* yang membuat mereka tidak terjajah sampai akhir masa kolonialisme.

Berdasarkan hasil penelitian peneltiaan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa, sebagian besar *power politics* yang dilakukan negara Thailand pada masa kolonialisme adalah *soft power* yang berdasarkan pada salah satu komponennya yaitu diplomasi, diplomasi ini diwujudkan negara Thailand dengan bentuk negosiasi dan kerja-sama, bentuk negosiasi dan kerja sama tersebut bisa dilihat dari hubungan dagang mereka dengan negara-negara pelaku kolonial, kerja sama militer, atau pun membuat perjanjian-perjanian.

Selain *soft power* negara Thailand juga teridentifikasi menggunakan bentuk *hard power*, yaitu berdasarkan komponen kekuatan militer (*military*) dan wilayah atau geografi (*geography/territory*). Kebanyakan kasus negara Thailand menggunakan kekuatan militer ketika sudah di serang duluan oleh negara lain, disamping itu juga keuntungan wilayah dan geografi menguntungkan mereka dalam membuat hubungan dengan negara lain karena dianggap strategis oleh pelaku kolonial.

Disamping kedua bentuk *power* diatas peneliti juga menemukan bahwa diambil dari penjelasan mengenai hubungan negara Thailand dengan negara lain pada masa kolonialisme, kondisi negara Thailand yang dikelilingi oleh banyak negara kolonial kala itu menyebabkan mereka menjadi negara *buffer state* atau *buffer zone*, yaitu negara penyangga atau negara tengah.

Kondisi *buffer state* ini dikarenakan pada saat masa kolonialisme lokasi mereka dikelilingi oleh banyak negara kolonial lain, seperti perbatasan barat dan selatan Thailand Mengatasi koloni Inggris, perbatasan timur Mengatasi koloni Prancis. Thailand bermain sebagai *buffer state*, artinya menyerap masalah yang dibuat oleh

negara koloni disekelilingnya, tetapi tidak jatuh ke salah satu dari mereka, hingga negara Thailand akhirnya tetap bebas tanpa dijajah sampai dimana masa kolonialisme berakhir.